



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA** : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

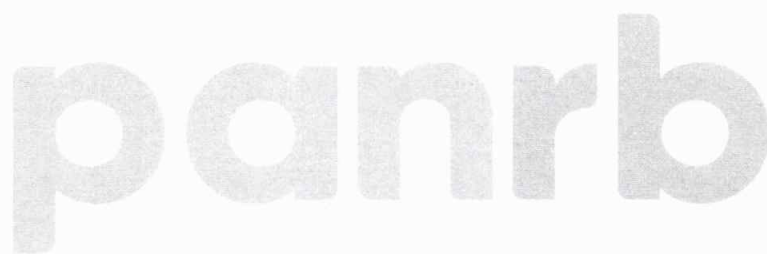
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	50	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	NUTRISIONIS TERAMPIL	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



panrb

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		900	
1.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM
3.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 KEDOKTERAN ; S-1 AGAMA KRISTEN ; S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK ; S-1 AGAMA ISLAM ; S-1 TEOLOGI (KRISTEN) ; S-1 KEPERAWATAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ILMU PERTANIAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
14.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO ORGANISASI
15.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
18.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 AGAMA KRISTEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
20.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
21.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN
22.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
23.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
24.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
25.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
26.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
27.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; D-IV DESTINASI PARIWISATA ; D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA ; D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA ; D-IV PARIWISATA BAHARI ; S-1 PARIWISATA BUDAYA DAN KEAGAMAAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
28.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
29.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
30.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ANTROPOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
32.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 STATISTIKA	9	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
33.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
34.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
35.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
36.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
37.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
38.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
39.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT
40.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
41.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
42.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
43.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN
44.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
45.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
46.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
47.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
48.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
49.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
50.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
51.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
53.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
54.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
55.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
56.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU I
57.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR KHUSUS
58.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR KHUSUS
59.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II
60.	AUDITOR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III AKUNTANSI ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III ADMINISTRASI PAJAK ; D-III TEKNIK SIPIL	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT
61.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SUB BAGIAN UMUM
62.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM
63.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
64.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU POLITIK	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJA SAMA
65.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
66.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
67.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
68.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
69.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
70.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG SEKSI PENYEKUTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR MINUM
71.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK MESIN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK MESIN ; D-III TEKNIK LINGKUNGAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN BINA KONSTRUKSI SEKSI BINA KONSTRUKSI
73.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
74.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
75.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
76.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
77.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
78.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
79.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
80.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
81.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN
82.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
83.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
84.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SUB BAGIAN UMUM
85.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH III
86.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
87.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM
88.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
89.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
90.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH II
91.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
92.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM WILAYAH I
93.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
94.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
95.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		POLITIK		PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
96.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
97.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
98.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 EKONOMI ; D-IV ILMU PERIKANAN ; S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK KELAUTAN ; S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN ; D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; S-1 PERMESINAN PERIKANAN	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT
99.	PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN	S-1 GIZI ; S-1 FARMASI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KIMIA	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI KESEHATAN, KELUARGA DAN GIZI
100.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI KESEHATAN, KELUARGA DAN GIZI
101.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
102.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK
103.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
104.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN BIDANG PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
105.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
106.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SUB BAGIAN UMUM
107.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
108.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
109.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
110.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
111.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
112.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KESATUAN BANGSA SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
113.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN FASILITASI PENATAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				WILAYAH
114.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
115.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS
116.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
117.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
118.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
119.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI PERENCANAAN
120.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
121.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
122.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
123.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN I
124.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
125.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN ASN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN ASN
126.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA SUB BIDANG PENDIDIKAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN OLAHRAGA DAN PEMUDA, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
127.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS SEKSI PENDIDIKAN KHUSUS
128.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM
129.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS SEKSI PENDIDIKAN AKADEMI KOMUNITAS
130.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG KOOPERASI DAN UKM SEKSI KOOPERASI
131.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
132.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SEKSI FASILITASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK
133.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BIDANG KEPEMUDAAN SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA
134.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
135.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
136.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
137.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG TENAGA KERJA SEKSI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
138.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
139.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN HUTAN SEKSI PERENCANAAN DAN TATA HUTAN
140.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	8	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
141.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PARIWISATA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
142.	PENATA KELOLA PERTAMBANGAN	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 GEOLOGI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 KIMIA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEODESI	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKSI MINERAL DAN BATUBARA
143.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
144.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
145.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
146.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
147.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SUB BAGIAN UMUM
148.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI
149.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
150.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN SUB BAGIAN PROTOKOL
151.	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	22	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
152.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
153.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
154.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN

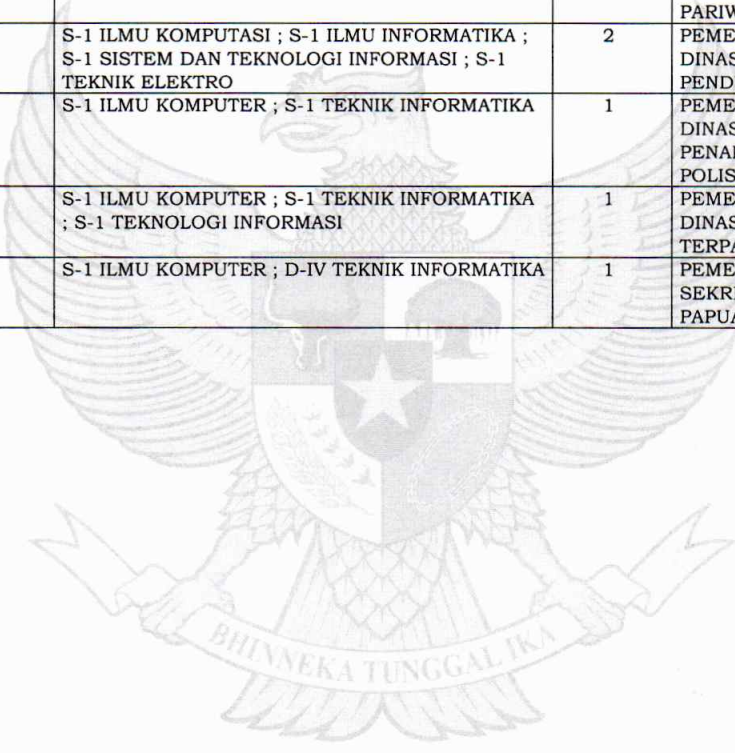
NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KOMPUTER ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN PAJAK		PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM
155.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
156.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN
157.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
158.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
160.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
161.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
162.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
163.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
164.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
165.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
166.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
167.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
168.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
169.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
170.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
171.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
172.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
173.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	25	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
174.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
175.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
176.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU KOMPUTER	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
177.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
178.	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	SMK PERIKANAN ; SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN ; SUPM TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; SMK AGRIBISNIS PERIKANAN ; SMK BUDIDAYA PERIKANAN ; SMK NAUTIKA PERIKANAN LAUT ; SMK PERMESINAN PERIKANAN ; SUPM TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; SMK TEKNIK MESIN	12	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT
179.	PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMULA	SMK PERTANIAN	15	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
180.	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PERIKANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN SEKSI INDUSTRI AGRO
181.	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 MATEMATIKA ; S-1	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KEHUTANAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK BIOMEDIS ; S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI ; S-1 TEKNIK BIOSISTEM ; S-1 TEKNIK MATERIAL ; S-1 TEKNIK MEKATRONIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV KIMIA TEKSTIL ; S-1 TEKNIK KELAUTAN ; S-1 TEKNIK PERKAPALAN		PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN SEKSI INDUSTRI AGRO
182.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU I
183.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU III
184.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II
185.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH INSPEKTORAT INSPEKTUR KHUSUS
186.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN SUB BAGIAN PROTOKOL
187.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI RUMAH SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
188.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI
189.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III BUDIDAYA PERAIRAN ; D-III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK MESIN ; D-III KESEHATAN HEWAN ; D-III ANALISIS KIMIA ; D-III PEMBENIHAN IKAN ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN ; D-III ADMINISTRASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III KOMUNIKASI ; D-III DESAIN KOMINIKASI VISUAL ; D-III TEKNIK PERKAPALAN ; D-III KELAUTAN ; D-III PERIKANAN	6	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT
190.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III FARMASI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
191.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
192.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMUNIKASI	25	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
193.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
194.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN ; S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	30	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
195.	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	SMK TEKNIK	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
196.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 KIMIA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
197.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU BIOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
198.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 SAINS LINGKUNGAN ; D-IV SANITASI LINGKUNGAN ; D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	8	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
199.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERKEBUNAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN PERTANIAN ; S-1 ILMU	12	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		EKONOMI PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN		
200.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III TEKNIK PERTANIAN	13	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
201.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN PROVINSI SUB BAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN
202.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
203.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI PELAYANAN MAJELIS DAN PERSIDANGAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN
204.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
205.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
206.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
207.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
208.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
209.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
210.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
211.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
212.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
213.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
214.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
215.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAHA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
216.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
217.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
218.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
219.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
220.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
221.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
222.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
223.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
224.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN
225.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
226.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
227.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
228.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
229.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
230.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
231.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; D-IV AKUNTANSI	7	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
232.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
233.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN
234.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
235.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
236.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
237.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
238.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
239.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
240.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN	9	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
241.	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR	20	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS
242.	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	4	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
243.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIOLOGI	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
244.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	74	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
245.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	10	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
246.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
247.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 RANCANG KOTA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA	5	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN SUB BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
248.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
249.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
250.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	9	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
251.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA
252.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
253.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
254.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
255.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
256.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
257.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
258.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
259.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
260.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN
261.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANAHAN
262.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
263.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
264.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
265.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
266.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
267.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
268.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
269.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH



panrb